E-ISSN : 2338-1779
http://ijws.ub.ac.id

DIPLOMASI HIBRIDA: PEREMPUAN DALAM RESOLUSI KONFLIK MALUKU

Helmia Asyathri[1.1], Keppi Sukesi[2.1], Yayuk Yuliati[3.1]

[1]Program Magister Kajian Wanita, Universitas Brawijaya

Abstrak

Keberadaan perempuan diakui oleh masyarakat internasional sangat penting dalam proses penyelesaian konflik, namun menjadi persoalan lain ketika dihadapkan pada pertanyaan "dapatkah perempuan berperan sebagai agen resolusi konflik diluar pertemuan formal?". Peneliti berniat menggali aktivitas perempuan di wilayah non-formal, sebagai bentuk Diplomasi Hibrida yang berpengaruh dalam resolusi konflik di Maluku. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif - kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang berlokasi di kota Ambon, Maluku. Hasil penelitian ini mengidentifikasi konflik komunal di Maluku sebagai konflik sosial yang berkepanjangan, yang dinamikanya sesuai dengan model *Protracted Social Conflict* yang dikembangkan oleh Edward Azar. Namun berbeda dengan model Azar yang mainstream dan tidak sensitive gender, penelitian ini memperlihatkan peran perempuan di sektor informal seperti di pasar tradisional mampu mempengaruhi proses resolusi konflik Maluku. Aktifitas *Papalele* atau perempuan pedagang di kota Ambon, tanpa mereka sadari dapat membantu proses resolusi konflik. Perannya dalam tahapan *Peacekeeping, Peacemaking*, maupun *Peacebuilding* menjadikan mereka anomali dalam kajian resolusi konflik dan diplomasi. Dengan demikian, *Papalele* dan aktifitas perdagangannya di Ambon dapat dikatakan sebagai aktor dan aktifitas Diplomasi Hibrida.

Kata Kunci: Diplomasi Hibrida, Resolusi Konflik, *Protracted Social Conflict*, *Papalele*, Isu Perempuan

Abstract

Existence of women has been acknowledged by international society as the essential part on the process of conflict resolution. But it's another matter when it comes to the question "could they play their role as agent of conflict resolution outside the formal meeting?". We intended to exemine the activity of women at informal area as a form of Hybrid Diplomacy, which influence conflict resolution in Maluku. This is a descriptive - qualitative research, uses indepth interviews and literature study located in Ambon, Maluku. As a result, this research identifies comunal conflict at Maluku as a protracted social conflict. The dynamic of conflict in Maluku confirms the model of protracted social conflict developed by Edward Azar. However, different with Azar's mainstream-gender insenstive-conflict analysis, this research found the role of women in informal areas such as traditional market were able to influence the conflict resolution in Maluku. The activity of *Papalele* or merchantwomen at Ambon's traditional market, even they're not aware of it, were able to improve the process of conflict resolution. The role of *Papalele* at peacekeeping, peacemaking, and peacebuilding made them anomaly in the literature of conflict resolution and diplomacy. Therefore, *Papalele* and their activity considered as Hybrid Diplomacy.

Keywords: Hybrid Diplomacy, Conflict Resolution, Protracted Social Conflict, *Papalele*, Women issues

PENDAHULUAN

Tidak banyak yang mengakui aktivitas perempuan diluar meja perundingan kontributif dalam rekonsiliasi konflik, sementara kontribusi diforum perundingan formal pun relatif dalam tataran substansial. Setidaknya di Maluku, keberadaan perempuan di sektor formal relatif kurang berperan. Kurangnya kontribusi aktor ini terlihat dari *output* perundingan yang jarang menempatkan perempuan sebagai fokus. Padahal perempuan merupakan pihak yang paling rentan sebagai korban dalam konflik, juga memainkan posisi krusial sebagai kombatan, maupun sebagai agen resoulsi konflik lewat aktivitasnya diakar rumput sebagai pemutus mata rantai dalam trauma generasi berikutnya.

Upaya resolusi konflik di Maluku melibatkan beragam pelaku, yang aktifitasnya dilakukan dengan cara negosiasi dan diplomasi. aktifitas diplomasi dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat baik secara tradisional oleh pemerintah, maupun dalam pengertian kontemporer oleh aktor non-negara. Salah satu konsep diplomasi yang muncul dengan identifikasi pelaku dan aktivitas yang luas adalah Diplomasi Multi-Jalur [1]. Konsep diplomasi ini mengembangkan Sembilan jalur (*tracks*) dengan harapan mampu mengidentifikasi luasnya pelaku dan aktifitas diplomasi dalam resolusi konflik. Sayangnya, dalam perkembangannya belum mampu mengakomodasi beberapa pelaku dan aktivitas diplomasi dalam kenyataan empiris konflik dan resolusi konflik di Maluku.

Helmia Asyathri
Email : mia.asyath@gmail.com
Alamat : Universitas Brawijaya, Jl. Mayjen Haryono 169, Malang, 65145, Indonesia

Konflik yang terjadi di Maluku sendiri merupakan salah satu contoh dari fenomena konflik sosial yang berkepanjangan. Kerusuhan Ambon yang pecah di tahun 1999, merupakan akumulasi dari konflik-konflik yang berakar sejak masa kolonialisme Belanda hingga pemerintahan Orde Baru. Edward Azar [2] menjelaskan prakondisi konflik atau penyebab terjadinya konflik sosial berkepanjangan, sebagai akumulasi dari persoalan deprivasi pemenuhan ekonomi dan kompleksitas situasi yang bersinggungan dengan identitas komunal. Akar kekerasan konflik Maluku dapat ditarik hingga beberapa dekade sebelumnya. Gerry Van Klinken [3] mengidentifikasi awal kekerasan di Maluku terlihat sejak tahun 1970-an, dimana sejumlah besar penduduk Muslim dari wilayah-wilayah lain di indonesia direlokasi ke Maluku. kebijakan imigrasi yang dilakukan oleh orde baru menggusur populasi Kristen dan mengubah proposisi afiliasi agama penduduk masyarakat Maluku. Kedatangan para pendatang juga memperkecil kesempatan kerja bagi penduduk lokal yang memicu antagonisme komunal berdasarkan identitas "lokal versus pendatang"

Serangkaian upaya resolusi konflik Maluku telah dilakukan oleh berbagai pihak. Pada bulan Februari 2002, perwakilan dari komunitas muslim dan kristen menandatangani perjanjian damai Malino II. Upaya resolusi konflik di Maluku di tataran formal ini aktifitasnya dilakukan dengan cara negosiasi dan diplomasi. Berbagai aktifitas diplomasi yang dilakukan oleh pihak yang terlibat, baik secara tradisional oleh pemerintah, maupun dalam pengertian kontemporer oleh pihak non-negara. Setidaknya beberapa pihak non-negara yang terlihat bisa terdeteksi dalam Diplomasi Multi-Jalur, misalnya keberadaan organisasi non profit, kelompok cendikiawan, kelompok agama yang terlibat dalam upaya menurunkan ketegangan dan penyelesaian konflik di Maluku. Perempuan pun memang terlihat dalam perundingan formal, namun sebatas perwakilan komunitas agama dan tidak dimaksudkan untuk membahas ikhwal keperempuanan.

Diplomasi Hibrida merupakan salah satu konsepsi diplomasi baru, yang berupaya mengakomodasi Pihak non-state secara lebih spesifik dalam aktifitas diplomasi, yang tidak berhasil dikerangkai oleh Diplomasi Multi-Jalur. Berbeda dari Diplomasi Multi-Jalur dengan sembilan jalur (track 1-9) yang dipakemkan untuk mengidentifikasi aktor dan aktifitasnya, Diplomasi Hibrida bergerak pada jalur tengah. Diplomasi hibrida mampu mengidentifikasi pelaku- pelaku yang sebelumnya tidak terdeteksi atau teridentifikasi pada track-1 hingga track-9 dengan memberi ruang di persimpangannya atau jalur tengah. Sebagai mana perempuan sebagai Pelaku diplomasi dan resolusi konflik Maluku yang belum mampu diidntifikasi dalam jalur tertentu Diplomasi Multi-Jalur.

Dalam literatur diplomasi, aktivitas perempuan masih belum terdeteksi dalam kerangka Diplomasi Multi-Jalur, sementara berbagai aktor dan aktifitas non-formal termasuk didalamnya. Penulis melihat perempuan pedagang di wilayah informal atau *Papalele* dengan aktifitas berdagangnya di pasar, sebagai salah satu aktor dan aktifitas Diplomasi Hibrida yang belum teridentifikasi sebagai actor dalam resolusi konflik Maluku. *Papalele* dengan diplomasi hibrida memperlihatkan keberadaan Pelaku dan pergerakannya sebagai bentuk diplomasi yang berada di persimpangan jalur tiga (*Peacemaking trough Commerce*) dan jalur empat (*Peacemaking trough Personal Involvement*) dalam Diplomasi Multi-Jalur

Berangkat dari pesoalan konflik Maluku dan peran perempuan dalam resolusi konflik Maluku yang tidak terakomodasi dalam konsep Diplomasi Multi-Jalur, maka penelitian akan difokuskan untuk menganalisis Konflik Maluku sebagai konflik sosial yang berkepanjangan dinamika konflik, serta peran perempuan Ambon di wilayah informal dalam upaya resolusi konflik Maluku, serta pemetaan aktivitas perempuan melalui diplomasi Hibrida dalam resolusi konflik.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik Maluku sebagai salah satu konflik sosial yang berkepanjangan, serta menjelaskan aktifitas perempuan pedagang (*Papalele*) di kota Ambon sebagai bentuk Diplomasi Hibrida yang berperan dalam resolusi konflik

TINJAUAN PUSTAKA

Konflik Internal

Sebelum membahas bagaimana resolusi konflik Maluku berjalan, tulisan ini akan diawali dengan identifikasi konflik Maluku. Konflik Maluku merupakan salah satu contoh konflik internal, dan juga merupakan pendekatan baru dalam kajian konflik yang mengalami transformasi. Stephen Ryan [4] memperlihatkan Bila sebelumnya *Conflicologist* menekankan perhatian pada konflik antar negara (*interstate conflict*) dan kurang memberikan perhatian pada

fenomena konflik internal (*intra state conflict*), kini *trend*-nya mengalami pergeseran. Senada dengan Yulius P Hermawan [5] konflik internal merupakan *trend* baru dalam kajian Hubungan Internasional yang menggeser popularitas perang antar negara *ala* Clausewitzian dalam politik internasional. Brown [6] mendefinisikan konflik internal sebagai:

> *"Violent or potential violent political disputes whose origin can be traced primarily domestic rather than systemic factors, and where armed violence takes place or threaten to take place primarily within the border of a single states*. (Brown, 1996:1)

Brown menempatkan masalah domestik sebagai pemicu utama dalam konflik internal. Persoalannya, definisi ini membatasi satu-satunya sumber terjadinya konflik pada wilayah negara tunggal tanpa memperhitungkan factor eksternal dalam pengertian geopolitik. Padahal dalam beberapa kasus konflik dengan intensitas tinggi seperti konflik Maluku, kekerasan yang terjadi turut dipicu oleh intervensi eksternal, sebagaimana digambarkan Brauchler [7] seperti masuknya kelompok Laskar Jihad di Ambon yang memiliki afiliasi dengan kelompok teroris Timur-Tengah.

Aspek internalitas yang didefinisikan Brown sebelumnya memang secara spesifik tidak menyebut pemicu konflik, namun lebih umum pada asal atau *origin* dari konflik. Kemudian dalam tulisannya yang lain, Brown dalam Crocker [8] mencoba lebih Spesifik menjelaskan sebab konflik dengan pembagian penyebab utama (*underlying causes*) dan penyebab pemicu (*proximate causes*). Setidaknya terdapat empat factor penyebab kekerasan dalam konflik internal yaitu struktur, politik, sosial-ekonomi dan Kultur.

Dalam konflik Internal, kelompok etnis merupakan entitas yang paling rentan dalam aksi kekerasan. Terminologi etnisitas sendiri tidak mencapai konsensus dalam berbagai literatur. Banyak penulis yang menggunakan istilah 'ethnic group'. 'Ethnic Community', 'Ethnie', 'minority', atau 'identity group' dengan berbeda-beda, salah satunya Anthony Smith [9]:

> *"ethnic groups are historically given collectivities or psychological communities whose members share a persisting sense of common interest and identity that is based on some combination of shared historical experience and valued cultural traits, beliefs, culture and religion, language, way of life, a common homeland*" (Smith, 1997:28).

Dari definisi diatas, konflik Maluku dapat dikatakan sebagai konflik etnis karena melibatkan dua kelompok yang bertikai yang masing-masing yang diikat oleh kesamaan identitas, khususnya agama. Stavenhagen (1996) menekankan persoalan agama sebagai penanda penting bagi identitas etnik, terutama pada masyarakat yang hidup dengan agama sebagai faktor hegemonik dalam aspek kehidupan publik. Menurut Ismayilov [10] yang senada dengan Jack Snyder dalam Brown (1993) pentingnya agama sebagai penentu etnis yang tidak hanya sebatas ekspresi diri atas keyakinan religius tertentu tetapi juga komunitas, tingkah laku kolektif dan kepemilikan. Begitu pula dengan masyarakat Maluku, identitas sebagai Muslim maupun Kristen merupakan ekspresi komunitas. Saat salah satu saudara seimannya dilukai maka komunitas bertindak.

Protracted Social ConflictSenada dengan kontingen internalis lainnya, Edward Azar [2] memberikan landasan pada jenis-jenis konflik sosial yang berkepanjangan atau *Protracted Social Conflict*. Azar meletakkan dasar konflik yang menguak ke permukaan pada deprivasi pemenuhan kebutuhan dasar dan kompleksitas situasi yang bersinggungan dengan identitas komunal yang terakumulasi dengan factor-faktor eksternal.Terdapat empat pra-kondisi yang mengarah pada terjadinya konflik atau yang mentransformasi konflik *non violent* menjadi *violent conflict*. yakni, *Communal Contempt*, *Human Needs*, *Government and States Role*, dan *International Linkages.*

Communal Contempt, diilustrasikan dengan adanya hubungan yang tidak harmonis antara kelompok identitas dengan negara. Persoalannya muncul ketika negara tidak mengakui eksistensi kelompok identitas tersebut atau bahkan berusaha mengeliminasi demi kepentingan eksistensi dan keutuhan negara. Akibatnya, terjadi alienasi terhadap kelompok identitas tertentu dan mendorong para anggotanya untuk melakukan perlawanan.

Human needs berangkat dari kegalauan komunal dengan kenyataan dimana pemerintah telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan sehingga terjadi proses kemiskinan secara sistematis. Deprivasi ekonomi merupakan salah satu contoh, ini digambarkan pada kondisi

surplus ekonomi yang dinikmati oleh kelompok yang berkuasa di pusat dari hasil eksploitasi sumber daya, sementara kelompok lainnya (yang dikuasai dan berada di pinggiran) tidak menikmati bahkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Government and States Role berkaitan dengan negara yang memiliki otoritas untuk memerintah dan menggunakan instrument kekuatan negara untuk memastikan setiap kelompok komunal di wilayah teritorialnya dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Azar [2] mengisyaratkan secara empiris negara tidak ideal, konflik yang terjadi merupakan negasi atas realitas negara dimana otoritas politik di monopoli oleh kelompok komunal tertentu yang menggunakan negara untuk memenuhi kepentingannya diatas kepentingan bersama.

International Linkages. menekankan faktor peran negara yang gagal dalam memenuhi kebutuhan, keamanan, dan pengakuan eksistensi identitas kelompok komunal, karena pengaruh entitas internasional.

Gender dalam *Protracted Social Conflict*

Pandangan konflik dalam tradisi feminis melihat konflik berkepanjangan yang dikemukakan Azar [2] tidak utuh dalam mendeskripsikan komunal, bahkan secara general keberadaan perempuan dalam konflik dinilai kabur. Peran perempuan dalam konflik perlu dikaji dengan mempertimbangkan konteks dimana konflik terjadi. Analisis terhadap konteks menurut Reimann dapat menciptakan alternatif yang lebih adil dalam permasalahan perempuan dalam konflik yang berkepanjangan. Cordula Reimann [11] melihat keterlibatan perempuan dalam konflik harus dilihat secara *Bottom-Up* dan tidak hanya mengacu pada aktor negara seperti yang dijelaskan Azar [2]. Konflik harus dipahami sebagai situasi yang melibatkan pihak penekan dan pihak yang tertekan, dimana perempuan sebagai kelompok yang dominan menjadi korban karena identifikasi gender yang terbentuk secara sosial dan rentan mengalami kekerasan tradisional maupun struktural.

Pendekatan Interseksionalitas secara lebih komprehensif diilustrasikan oleh Reimann [11] dengan mengangkat dimensi yang lain termasuk identitas yang saling padu untuk menggambarkan fiksasi behavior termasuk pada fenomena mengapa perempuan dikonstruksi untuk menjalankan peran tertentu. Terdapat komponen penting dalam dimensi segitiga gender yang dikembangkan oleh Reimann yakni identitas, struktur dan simbol yang saling mempengaruhi dalam konstruksi sosial peranan berdasarkan jenis kelamin.

Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan tidak dapat dilepaskan, bahkan bila salah satu mengalami perubahan *(shifting)* akan mempengaruhi dimensi yang lain. Sebagai contoh bagaimana gender terstruktur dalam pembagian kerja antar perempuan dan laki laki *(gender division of labor)*, tidak akan memberikan makna yang dalam secara politis maupun teoritis bila tidak dikaitkan dengan simbol dan identitas, keduanya. identitas dan simbol memberikan pengaruh atas produksi dan re-produksi struktur gender. Demikian halnya dengan perubahan dalam struktur masyarakat, misalkan pada perempuan yang berperan sebagai kombatan (area dominan laki-laki) dalam konflik, secara perlahan-lahan akan mempengaruhi pemahaman stereotipikal atas simbolisme gender terhadap behavior sosial perempuan, hal ini menjawab bagaimana posisi dan peran perempuan dalam konflik yang mengalami pergeseran. Selanjutnya Reimann menambahkan, identitas individu, simbol maupun struktur gender berada pada posisi interdependen dengan setting kultur.

Manifestasi setiap kategori berbeda berbeda bentuknya pada kultur yang berbeda dimana makna gender sangatlah cair dan secara historis mengalami perubahan. Dengan demikian, definisi dan pemahaman gender dapat berubah pada perbedaan kelas, budaya, kelompok usia, dan pada masa perang maupun masa damai. Inilah sisi interseksionalitas gender. Dalam konflik Maluku, perempuan berada dalam posisi interseksional. Terlihat dari bagaimana peran-peran yang dimainkannya baik sebagai kombatan, maupun sebagai agen resolusi konflik berkaitan dengan identitas, simbol, dan struktur.

Resolusi Konflik

Menelaah resolusi konflik, Johan Galtung [12] menekankan tiga proses yang harus dilewati sebelum perdamaian tercipta: *Peacekeeping, Peacemaking,* dan *Peacebuilding*. *Peacekeeping*, merupakan tahapan resolusi konflik dimana proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan (*Absence of Direct Violence*). Tahapan berikutnya *Peacemaking*, yakni proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, maupun arbitrasi dari level elit atau pemimpin, Tahapan

E-ISSN : 2338-1779
http://ijws.ub.ac.id

terakhir *Peacebuilding*, dimana implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, ekonomi, dan politik dilaksanakan demi tercapainya perdamaian yang langgeng.

Diplomasi Multi Jalur

Metode resolusi konflik non-kekerasan menurut Joseph Montville [13] kebanyakan menggunakan diplomasi sebagai instrumennya. Baik yang dilakukan secara tradisional dipraktekkan oleh negara, maupun oleh aktor non negara. Konsep yang sebelumnya di kembangkan oleh Bermann [14], yang menggunakan istilah formal (official), maupun non-formal (unofficial).

Lebih jauh Diamond dan McDonald [1] mengembangkan jalur-jalur baru untuk mengakomodasi pelaku dan aktivitas *Unofficial* tersebut dalam suatu kerangka konseptual Diplomasi Multi Jalur. Diamond dan Mc.Donald [1] mengembangkan Jalur-Jalur diplomasi dalam sebuah kerangka konseptual dan praktis sebagai pegangan untuk memahami kompleksitas aktivitas resolusi konflik dalan sebuah sistem. Diplomasi Multi Jalur yang dikembangkan oleh oleh Louis Diamond dan Mc.Donald mengidentifikasi Sembilan jalur dalam diplomasi, diantaranya pemerintah (Track-1) organisasi non profit (Track-2), Kelompok Ekonomi (Track-3) Individu (Track-4), kelompok cendikiawan (track-5), kelompok Advokasi (Track 6), kelompok agama (track-7), kelompok pendonor (Track-8), Media masa (Track-9)

Gambar1: Diplomasi Multi Jalur



Sumber: Diamond McDonald (1996) *Multi-Track Diplomacy, A systems Approach to Peace*, 3rd editions, Connecticut, Kumarian Press

Diplomasi Hibrida

Diplomasi Hibrida merupakan konsepsi baru yang dikembangkan oleh Susan Nan [15] yang disempurnakan oleh Mapender [16] berupa gabungan dua jalur diplomasi atau lebih. Berbeda dengan diplomasi Multi-Jalur yang mengidentifikasi aktor dengan tunggal dimana aktivitasnya berada dalam pakem *track 1-9*, Diplomasi Hibrida menunjukan keunikan aktivitas resolusi konflik oleh aktor yang tidak dapat diidentifikasi murni pada satu jalur tertentu dalam Diplomasi Multi Jalur, Diplomasi Hibrida dimana pelaku dan aktivitasnya yang unik tidak cukup dimasukkan dalam kategori jalur tertentu dalam Diplomasi Muti-Jalur, berada pada wilayah persimpangan jalur-jalur dalam diplomasi atau wilayah tengah. Maka, dalam resolusi konflik Maluku dimana aktivitas dan aktor seperti *Papalele* yang tidak terdeteksi Diplomasi Multi jalur masuk dalam wilayah diplomasi hibrida atau jalur 3.5. berada di persimpangan jalur tiga (*Peacemaking trough Commerce*) dan jalur empat (*Peacemaking trough Personal Involvement*)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berperspektif feminis yang menekankan *participatory Approach* dalam prosesnya. Peneliti sebagai salah satu instrumen penelitian turut berpartisipasi dalam penyadaran perempuan khususnya *Papalele* terkait signifikansi keberadaannya dalam resolusi konflik Maluku. dengan pendekatan partisipatori yang dilakukan oleh peneliti, diharapkan perempuan sadar akan potensi dirinya serta dapat diberdayakan secara optimal dalam resolusi konflik Maluku.

Penelitian ini mendekripsikan serta menganalisis konflik Maluku, serta peran perempuan pedagang (*Papalele*) dalam proses resolusi konflik. Metode deskriptif-kualitatif, digunakan dengan mengambil lokasi penelitian di kota Ambon, provinsi Maluku. pemilihan lokasi didasarkan pada alasan kerusuhan Ambon yang pecah pada 19 Januari 1999 merupakan titik awal penyebaran konflik di wilayah Maluku. Tidak hanya sebagai titik awal konflik, Kota Ambon dipilih sebagai lokasi penelitian juga disebabkan oleh aktivitas pasar yang relatif lebih cepat pulih dibanding dengan wilayah konflik lainnya di Maluku.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara observasi serta studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam pada informan yang memiliki pengalaman semasa konflik. *Papalele* dijadikan sebagai subjek penelitian karena pengalamannya semasa konflik, dan tetap menjalankan aktivitas perdagangan sekalipun mereka harus melewati zona berbahaya seperti wilayah perbatasan. Informasi keberadaan
Papalele yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. didapatkan dari informan kunci yakni Suster Brigitta Renyaan yang merupakan tokoh perempuan Katolik Maluku yang berperan dalam resolusi konflik ditingkat formal pada perjanjian malino II serta Institut Tifa Damai Maluku, yang melakukan asistensi dalam rekonstruksi pasca konflik di kota Ambon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Warisan Masa Lalu dan Pra-kondisi *Protracted Social Conflict* Maluku

Fenomena kekerasan yang mencapai puncak pada 19 Januari 1999 tidak muncul secara tiba-tiba, namun merupakan hasil dari akumulasi persoalan-persoalan komunal yang menumpuk dan berakar. Konflik Maluku yang sering dipahami sebagai permusuhan lama antara umat Kristen dan Muslim memiliki kompleksitas yang didasarkan pada pengalaman sejarah mulai masa kolonialisasi hingga tatanan sosial bentukan orde baru. Sebab-sebab utama maupun sebab-sebab pemicu kerusuhan Ambon, tak lepas dari adanya persaingan komunal. segregasi sosial yang diciptakan berdasarkan agama oleh otoritas yang berkuasa, turut menghasilkan deprivasi dalam masyarakat yang memunculkan konflik.

Polarisasi Sosial-Ekonomi

Pergolakan atas pengaturan administrasi yang dibentuk oleh Belanda datang dari kelompok komunal yang beragama Islam. Konflik yang muncul karena kecenderungan terjadinya polarisasi di bidang sosial dan ekonomi akibat kebijakan administrasi kolonial Belanda. Ziwar Effendi [17] dan Sri Yanuarti [18] menguraikan segregasi terlihat dari penduduk beragama Kristen diberi keistimewaan seperti ditempatkan pada pekerjaan di lingkungan *ambtenaar* (pegawai negeri), di lingkungan pendidikan, militer, dan sektor ekonomi jasa. Sementara penduduk beragama Islam yang dinilai tidak kooperatif dengan pemerintah Belanda dibatasi akses pendidikannya, dan lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas pada pada sektor- sektor pertanian dan perdagangan, itupun masih harus bersaing dengan etnis pendatang Buton dan Bugis.

Penelitian Dieter Bartels [19] menunjukan bagaimana *Previlege* yang diberikan oleh pemerintah Belanda pada komunitas Kristen dan pembatasan akses bagi komunitas muslim menciptakan perpecahan antar komunal. Sentimen “orang Belanda hitam“ disematkan pada loyalis belanda yang beragama Kristen yang selama kolonialisasi mendapatkan keuntungan .

Menurut Bartels [19] hubungan erat yang terjalin antara masyarakat Kristen Ambon dengan pemerintah Belanda dapat dikatakan bersifat mutual. Bagi Belanda, keuntungan yang didapat dari kolaborasi tersebut adalah terciptanya basis loyalis yang kuat di wilayah timur, sedangkan bagi penduduk Kristen Ambon terdapat beberapa keuntungan, salah satunya ekonomi. Kondisi ekonomi memainkan peran penting dalam keputusan individu untuk mendaftar sebagai tentara Belanda atau yang lebih dikenal dengan KNIL. Keistimewaan yang didapatkan dengan bergabung dalam KNIL yang diperoleh oleh pemuda Ambon misalnya berupa insentif pendaftaran yang jumlahnya dua kali lipat dibanding KNIL dari penduduk lokal lainnya.

Menurut Bartels [20] dalam tulisannya yang lain lebih detail menguraikan Masyarakat Maluku yang rata-rata bersandar padaa pertanian rempah-rempah, terpaksa menghadapi krisis pada tahun 1874 dan 1890 dimana harga cengkeh yang menurun drastis, dan petani tidak lagi mampu melanjutkan produksi sedangkan situasi yang berbeda dialami oleh KNIL. Saat harga cengkeh turun, pemasukan petani surut, kondisi pasar lesu, justru KNIL mendapat kenaikan insentif dan tunjangan oleh pemerintah Belanda. Dengan demikian kondisi yang terjadi di masyarakat Maluku adalah ketimpangan ekonomi yang lebar.

Republik Maluku Selatan dan Pembedaan Identitas Politik

Pasca kemerdekaan Indonesia terjadi konflik antar masyarakat Maluku dimana warga Ambon menjadi terpecah (*Communal Contender*) atas dasar perbedaan kepentingan untuk merdeka atau tetap berada dibawah induk pemerintah Belanda. Sebagaimana yang diuraikan oleh FL Cooley [21] Kelompok komunal yang berkeinginan untuk tetap menginduk pada

Belanda dan tidak menginginkan bergabung dengan NKRI menghimpun diri.

Identitas politk dan rasa nasionalisme yang dimiliki masyarakat Ambon bisa dikatakan anomali dan tidak dapat digeneralisir. gagasan pembentukan negara Maluku Selatan, maupun tetap ingin dibawah pemerintah Belanda, merupakan sentimen nasionalisme yang lemah terhadap bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh anggapan Ambon tidak pernah mencicipi rasanya diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia sebagaiman pulau Jawa dan Sumatera. Ketika kemerdekaan Indonesia dideklarasikan, Indonesia tidak terlalu memiliki beban persoalan yang berat untuk mengintegrasikan Maluku dalam NKRI. Indonesia menerima Maluku sebagai suatu *restored package* yang tidak terlalu memerlukan usaha yang berat dalam proses integrasinya. Hal ini memunculkan kurangnya rasa memiliki oleh masyarakat Ambon dan menganggap bukan dari perjuangan Republik Indonesia.

Gerakan RMS merupakan salah satu contoh gerakan yang menginginkan disintegrasi dari NKRI akibat kurangnya *sense of belonging*. Sebagaimana dijelaskan oleh Bartels [20] Gerakan ini yang bergolak beberapa tahun pasca kepergian Belanda tidak hanya mempertajam perbedaan identitas politik dan sentimen nasionalisme, namun juga memperkuat segregasi kelompok komunal berbasis agama. senada dengan Trijono [22] segregasi politik ini turut diperkuat dengan kenyataan dimana para pemimpin sipil RMS sebagian besar berasal dari komunitas Kristen.

Orde Baru dan Segmentasi Sosial

Konstelasi hubungan antar komunal yang dibangun diatas struktur hubungan masa lalu ditambah ketegangan dan konflik kekerasan ikut ambil alih dalam konstruksi sosial masyarakat maluku. pergolakan yang terjadi akibat warisan kolonial membuat persaingan komunal seperti *Roller Coaster* dimana pada masa pemerintahan Belanda berkuasa, pergolakan komunal karena pengaruh kekuatan politik, sosial, ekonomi menempatkan komunitas penduduk yang beragama kristen pada posisi yang menguntungkan, namun pasca kemerdekaan pergolakan tetap berlanjut terutama pada masa orde baru yang menempatkan penduduk muslim pada posisi yang lebih strategis

Terdapat beberapa perubahan yang menonjol dari kebijakan- kebijakan orde baru yang mempengaruhi komposisi penduduk berdasakan etnis, dan agama. Perubahan komposisi penduduk merupakan salah satu akibat dari kebijakan transmigrasi yang dikeluarkan pada masa orde baru. Bila sebelumnya persoalan demografis terletak pada masalah ketimpangan akibat kebijakan favoritisme pemerintah Belanda terhadap penduduk asli yang beragama kristen, pada masa orde baru persoalan favoritisme masih tetap ada namun diperkaya dengan persoalan baru yang muncul dari pendatang.

Meningkatnya jumlah kaum migran turut mempengaruhi komposisi penduduk berdasarkan agama. Persoalan keseimbangan jumlah antara penduduk membentuk persepsi keamanan komunal. Jumlah penduduk Muslim dan Kristen yang mengalami perubahan, dimana penduduk Muslim mengalami peningkatan dibanding penduduk beragama Kristen. disamping itu, pendatang dari etnis Buton, Bugis, Makasar dan Jawa yang menjadi kontributor bagi peningkatan jumlah penduduk muslim di Maluku menimbulkan krisis hubungan, kecurigaan, dan ketegangan sosial.

***Underlying Causes* Konflik Komunal Kota Ambon**

Ketidak-adilan ekonomi merupakan salah satu dari beberapa permasalah domestik yang menjadi akar permasalahan dalam konflik internal masyarakat Maluku. sebagaimana dijelaskan oleh Brown (2001) faktor struktur, politik, ekonomi, dan budaya, yang menggerakkan masyarakat untuk berkonflik

Maluku dapat dijadikan salah satu contohnya, dimana kebijakan pemerintah Indonesia pada masa orde baru tidak mampu membuat masyarakat Maluku sejahtera. Konsekuensi dari kondisi tersebut mengarahkan pada keputusan masyarakat untuk mencari gantungan harapan di tempat lain. Adanya kecenderungan untuk menghimpun diri dalam suatu komunitas dengan afiliasi tertentu misalnya masyarakat Ambon pada komunitas-komunitas agama. Hal ini yang kemudian melahirkan pembedaan kami vs mereka, Kristen vs Muslim, atau sentimen putra daerah vs pendatang, dan mempengaruhi persepsi masing-masing terhadap keamanan.

Dalam konflik maluku diskriminasi merupakan kelanjutan dari kebijakan favoritisme yang dibiakkan oleh pemerintah yang berkuasa. Diskriminasi yang pemerintah menumbuhkan solidaritas kelompok tertindas dan mendorong terjadinya perlawanan dan mempertegas *communal contempt* yang sesuai dengan uraian

Azar [2] dalam konflik sosial yang berkepanjangan.

Dinamika konflik Maluku

Dinamika konflik Maluku dapat dianalisis lewat pemetaan kerusuhan Ambon sejak tahun 1999. Konflik kekerasan dikota Ambon muncul dalam empat fase, yakni fase kemunculan konflik (*emergence*), peningkatan (*escalation*), pecahnya konflik (*outbreak of conflict*) dan fase penurunan (*de-escalation of conflict*).

Kemunculan (*emergence*) Konflik

Menurut van Klinken [3] munculnya kerusuhan Ambon memiliki keterkaitan dengan konflik Jakarta tahun 1998 yang melibatkan preman Kristen dan Muslim asal Ambon. Pasca konflik Ketapang sekitar 200 preman Ambon, dikembalikan ke Maluku. dari eksodus preman–preman Ambon asal Ketapang inilah aksi provokasi yang berujung kekerasan pecah di kota Ambon.

Penelitian Pariela [23] menguraikan kronologis konflik Sebelum insiden Idul Fitri berdarah tahun 1999, telah terjadi beberapa kasus kekerasan dan aksi pembakaran rumah dan tempat ibadah di kampung Muslim dan Kristen. Setidaknya ada tiga kasus kekerasan yang terjadi dalam sebelum 19 Januari 1999 yakni Kerusuhan Wailete pada tanggal 13 Desember 1998, Peristiwa Air Bak tanggal 27 Desember 1998. dan peristiwa Dobo pada tanggal 14 Januari 1999. Dari ketiga kejadian kekerasan tersebut, terlihat kelompok-kelompok masyarakat mulai mengorganisir diri untuk melakukan tindakan bertahan, maupun *Pre-emptive Attack* sebelum diserang oleh kelompok lawan. Dari kasus-kasus tersebut, terlihat pola penyerangan terhadap diawali dan ditargetkan kepada etnis-etnis pendatang seperti suku Buton, Bugis dan Makassar. Alasan mengapa kelompok pendatang yang menjadi target kekerasan di awal masa konflik tersebut menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Center of Humanitarian Dialogue [24] disebabkan oleh posisi kelompok pendatang yang dominan dalam pasar kerja dan perekonomian Maluku.

Di masa kemunculan konflik terlihat beberapa pertemuan yang dilaksanakan oleh masing-masing komunitas. Untuk mencegah terjadinya konflik susulan. Pertemuan ini menimbulkan persepsi ancaman dari komunitas lainnya. kondisi inilah yang di sebut oleh Barry Posen [25] sebagai dilema Keamanan, dimana aktifitas atau tindakan kelompok lawan dianggap sebagai ancaman. Dalam kondisi yang anarkis, seperti konflik Maluku di masa-masa kemunculan, timbul kekhawatiran kolektif. Tiap-tiap kelompok berusaha membentuk kesatuan, menghimpun kekuatan. Lewat pertemuan tersebut, masing - masing komunitas akan mempersiapkan pertahanan diri, merencanakan pengamanan anggota komunitasnya. Sekalipun pertemuan-pertemuan tersebut dilaksanakan untuk pengamanan diri, namun akan dipersepsi lain sebagai suatu ancaman dari kelompok lawan. Kondisi Ambon saat itu tidak lagi bisa dibedakan yang mana tindakan defensif dan mana tindakan offensive (pre-emptive Attack).

Edward Azar [2] sebelumnya memperlihatkan setelah Pra-kondisi, akan muncul dinamika atau proses konflik. Dinamika dalam konflik Maluku merupakan konsekuensi dari pra-kondisi yang sesuai dengan pola kekerasan yang muncul dalam tahapan awal. konflik ditargetkan pada kelompok Muslim pendatang yang memiliki posisi dominan dalam sistem sosial masyarakat Ambon. Akumulasi yang menjadi deprivasi komunal seperti deprivasi ekonomi, yang secara sistematis menempatkan komunitas tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan dibanding komunitas lainnya.

Konsekuensi dari pra-kondisi mengarahkan konflik pada tahapan berikutnya yakni dinamika atau proses kekerasan. Dalam proses kekerasan, Azar (1990) memperlihatkan bagaimana kelompok komunal mulai menyusun strategi dan melakukan aksi. Dalam menyusun strategi dan melancarkan aksi, terlebih dahulu ada pemicu (*trigger*) yang berpotensi mengaktifkan konflik laten yang kemudian tereskalasi dalam konflik kekerasan dengan cakupan yang lebih intens. Pemicu tersebut biasanya dari hal yang sepele (*trivial event*) misalnya menyinggung individu yang datang dari identitas kelompok tertentu, namun penghinaan terhadap individu dirasakan secara kolektif. Hal yang sama terlihat dari ketiga kasus diatas, dimana kekerasan yang terjadi disebabkan oleh hal yang sepele misalnya masuknya hewan ternak salah satu warga Kristen ke kebun salah satu warga muslim, atau karena dua pemuda yang mabuk, atau pemalakan pada supir angkot berujung aksi bentrokan massa yang dilakukan oleh dua komunitas agama. Peristiwa-peristiwa yang dipicu oleh *trivial event* atau yang bersifat sepele, mendorong kelompok untuk membela anggotanya, yang berujung pada tindak

E-ISSN : 2338-1779
http://ijws.ub.ac.id

kekerasan komunal dengan intensitas tinggi dan mengarahkan pada eskalasi konflik.

Peningkatan (*Escalation*) Konflik

Gerak eskalasi konflik kekerasan di Maluku ditandai pada tanggal 19 Januari 1999, tepat pada perayaan hari besar umat Islam, Idul Fitri 1420 H. Bermula dari aksi pemalakan yang terjadi di terminal angkutan umum di desa Batumerah oleh oknum, kemudian berkembang menjadi kekerasan antara agama. Menyebarnya kekerasan fisik dan peningkatan jumlah kerusakan dan korban menurut beberapa penelitian sebelumya juga tak terlepas dari kurang tanggapnya pemerintah dan aparat keamanan. ada indikasi Aparat Keamanan terlibat konflik lewat beberapa insiden penembakan dan keberadaan pasukan *Sniper* di beberapa titik panas di kota Ambon

Gambar 2: Wilayah Rawan Konflik Di Kota Ambon



Sumber: sumber: Laporan Naratif sistem CEWERS (Conflict Early Warning System) bulan Agustus 2012 institut tifa damai Maluku

Kekerasan yang terjadi dalam bentuk penembakan bukanlah dilakukan oleh warga. Senjata yang dipakai dalam kerusuhan kota Ambon yang dipakai oleh massa masih sangat tradisional, lebih banyak menggunakan batu, balok kayu, Korban penembakan dengan senjata konvensional dan *sniper* bukanlah berasal dari massa kedua komunitas Muslim maupun Kristen, namun oleh oknum aparat keamanan. Sekalipun massa dari dua komunitas yang terlibat dalam kerusuhan Ambon terdapat senjata rakitan, namun lebih sebagai alat keamanan hanya untuk dipersepsi lawan sebagai senjata. Senjata rakitan sekalipun ada, kebanyakan tidak berfungsi dan tidak menjatuhkan korban. Senjata rakitan yang beredar di dua komunitas kota Ambon yang diharapkan sebagai alat untuk menjaga wilayahnya dari serangan lawan, tidak efektif untuk menjatuhkan lawan. Hal ini lebih sebagai penguatan psikologis komunal.

Pecahnya (Outbreak) konflict

Sepanjang tahun 1999-2000, Aksi kekerasan yang meluas. Hai ini bisa terjadi juga karena pemerintah tidak tanggap dan aparat keamanan yang tidak cepat menangani keadaan. Selain itu terdapat pula peran dari provokator yang menyebarkan isu-isu dan informasi pada masing-masing komunitas, makin memperparah konflik. Lebih lanjut mengenai kronologi pecahnya konflik Maluku tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kronologi Pecahnya konflik Maluku

Tahun	Bulan	Peristiwa
1999 .	Januari.	Perkelahian jalanan yang kecil meningkat menjadi kerusuhan di kota Ambon dan sekitarnya
	Februari	Kekerasan menyebar dengan penggunaan senjata api, sniper, hingga bom molotov baik oleh warga maupun oknum aparat keamanan
	Maret –April	Kekerasan massal menyebar tidak hanya di kota Ambon namun juga ke pulau lain di Maluku
	Mei	Pawai obor damai, dan deklarasi perdamaian Maluku
		Kampanye pemilihan umum dimulai dan kekerasan berkurang
	Juni	Pemilihan umum
	Juli – September	Kekerasan massal dimulai lagi di kota Ambon
	Oktober.	*Direct Contact* antara dua komunitas yang bertikai
	Desember	Konflik meningkat setelah gereja Silo dan mesjid An-Nur dibakar.
2000	April	Rekonsiliasi konflik "Makan Patita" dan pawai damai yang berujung pengeroyokan dan penyanderaan 10 pengemudi becak
	Mei	Kedatangan Laskar Jihad di kota Ambon
	Juni	Darurat sipil diberlakukan
	Desember	FKM mendekarasikan kemerdekaan Republik Maluku Selatan

Penurunan (de-eskalasi) Konflik

Penurunan konflik fisik ditandai mulai pada tahun 2001 yang dilakukan dengan operasi pembersihan senjata yang dilakukan oleh Batalyon gabungan yang didatangkan dari Jakarta. Operasi pembersihan disasarkan pada peredaran senjata di dua komunitas yang bertikai, operasi lapangan untuk menangkap *Sniper*, dan penyergapan Laskar Jihad serta penumpasan Fron Kemerdekaan Maluku dijalankan sepanjang tahun 2001. Menurut Center of Humanitarian Dialogue [24] pembersihan ini tidak hanya dilakukan pada pihak sipil, namun juga dalam internal aparat keamanan. Sasaran pembersihan internal ini dilakukan dengan cara mengusut dan menangkap oknum-oknum TNI dan Polri yang diduga terlibat dalam kasus kerusuhan Hotel Wijaya Dua di kota Ambon. Dari hasil pembersihan ini, sepanjang tahun 2001 kondisi kota Ambon relatif terkendali.

Bisa dikatakan ada faktor yang mendorong keberhasilan deeskalasi konflik pada tahun 2001, yakni kembalinya kepercayaan masyarakat pada aparat keamanan. Bila sebelumnya deeskalasi konflik pada tahun 1999 dan tahun 2000 masyarakat apatis bahkan tidak percaya pada aparat keamanan karena keterlibatannya dalam aksi kekerasan serta keberpihakannya pada komunitas tertentu, pada tahun 2001 mulai berubah. Sebelumnya aparat keamanan tidak hanya dinilai tidak netral, namun juga tidak serius dalam menghentikan aksi kekerasan. Sebagai contoh, ketika penyerangan terjadi banyak korban jiwa yang meninggal akibat penembakan yang dilakukan oleh parat keamanan tidak sesuai dengan prosedur. Baru pada tahun 2001 penghentian kekerasan oleh aparat keamanan dapat dilakukan dengan serius dan sesuai prosedur.

Tabel 2. Kronologi De-eskalasi konflik Maluku

Tahun	Bulan	Peristiwa
2001 .	Januari.	Batalyon Gabungan (Yongab) melakukan operasi pembersihan dengan target penyebaran senjata di dua komunitas dan penangkapan Laskar Jihad,
	Juni	Operasi pembersihan lanjutan dalam internal aparat keamanan untuk menjaring oknum-oknum yang terlibat dalam kerusuhan, dan penangkapan anggota FKM
2002	Februari	Perjanjian damai Malino II ditanda tangani

Untuk beberapa saat intensitas kekerasan berhasil, namun hal ini tidak berarti perdamaian tercapai. Konteks perdamaian negatif sebagaimana diuraikan oleh Johan Galtung (1964) terlihat pada momentum 2001-2002 ketika prejudis masih mendominasi interaksi masyarakat sekalipun sudah tidak lagi terjadi aksi kekerasan. Pada masa de-eskalasi konflik Interaksi masyarakat kota Ambon masih didasarkan pada persepsi identitas. Hubungan yang didasarkan kepercayaan (*trust*) masih sulit untuk diwujudkan pada saat itu, sebagai contoh bagaimana masyarakat merelokasi tempat tinggal pasca konflik pada permukiman tertentu (kompleks Muslim atau Kristen) atau bagaimana pedagang Muslim memilih lapak dagang di pasar yang bersebelahan dengan pedagang muslim lainnya meskipun secara ekonomi tidak begitu strategis, atau keluarga Kristen yang memilih menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen dibanding dengan sekolah negeri dengan alasan sekolah negeri dekat dengan pemukiman Muslim.

Teritori fisik Muslim-Kristen tidak pernah dihapuskan pemerintah dan pemuka masyarakat, begitu pula garis imajiner yang membatasi interaksi masyarakat berdasarkan rasa kepercayaan tak peduli apapun agamanya masih ada diantara masyarakat dalam bentuk prejudis. Hal ini mempersulit upaya rekonsiliasi konflik namun berangkat dari prejudis dan rasa ketidakpercayaan dari masing-masing komunitas ini yang mendorong beberapa pihak untuk menggagas pertemuan formal dalam rangka resolusi konflik dan upaya menciptakan perdamaian. Serangkaian upaya resolusi konflik membangun perdamaian di propinsi Maluku telah dilakukan oleh berbagai pihak. Memasuki tahun 2002, perwakilan dari komunitas muslim dan kristen menandatangani perjanjian damai Malino II pada tanggal 12 Februari 2002, setelah sebelumnya dilakukan intervensi dari pemerintah pusat.

Perempuan dalam Resolusi Konflik Maluku

Resolusi konflik Maluku di tingkat formal yang dinisiasi oleh pemerintah dilaksanakan dalam pertemuan Malino II. Pertemuan ini mengundang 34 orang sebagai perwakilan komunitas Kristen dan 35 orang dari komunitas Muslim di kota Ambon. Dari 69 delegasi pertemuan Malino II, hanya tiga diantaranya adalah perempuan [4]. Pertemuan ini dinilai bias gender karena tidak

hanya minim jumlah perwakilannya namun juga *output* pertemuan. Dari sebelas poin perjanjian Malino tidak ada satupun poinnya berkaitan dengan perempuan, padahal perempuan yang paling rentan dalam konflik Maluku, entah sebagai korban maupun kombatan. Seharusnya ikhwal perempuan dimasukkan dalam poin perjanjian Malino II dan dijadikan fokus dan pertimbangan penting dalam rekonsiliasi Maluku. Perempuan seharusnya dapat diberdayakan sebagai agen resolusi konflik dengan misi menghilangkan prejudis dan membangun kepercayaan hingga mewujudkan harmoni antar umat beragama

Perempuan dan Aktifitas informal dalam Rekonsiliasi Konflik

Sebelum pertemuan formal lewat Malino II diselenggarakan, perempuan-perempuan Ambon sudah lebih dahulu melakukan upaya resolusi konflik ditingkat akar rumput. Terdapat aktifitas yang disengajakan (intentional) maupun tidak sengaja (*unintended*) yang dilakukan oleh perempuan Ambon dalam proses resolusi konflik.

Upaya resolusi konflik yang dilakukan secara sengaja oleh perempuan terlihat dari beberapa pertemuan yang digagas oleh perempuan-perempuan dua komunitas agama yang kemudian menelurkan Gerakan Perempuan peduli. Gerakan ini muncul untuk membangun komunikasi antar komunitas agama yang bertikai di kota Ambon. Gerakan ini kemudian menjadi jembatan perempuan ditingkat *grassroot* untuk mengakses pejabat pemerintahan (laki-laki) dan mengadvokasi persoalan perempuan semasa konflik.

Aktifitas perempuan yang tidak disengajakan (*unintended*) memberikan pengaruh dalam upaya resolusi konflik, terlihat pada aktifitas *Papalele* atau para perempuan pedagang di pasar-pasar tradisional di kota Ambon. *Papalele* yang tetap melakukan aktifitas berdagang selama masa konflik turut mempengaruhi persepsi keamanan masyarakat kota Ambon. Meskipun tidak disadari dan dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik, namun *Papalele* mampu membuka jalur komunikasi antar kedua komunitas agama yang bertikai lewat aktifitas perdagangannya.

***Papalele* dan Resolusi Konflik Maluku**

Aktifitas *Papalele* ini meskipun secara tidak sengaja (*unintended*), memberi dampak pada ketiga tahapan resoulusi konflik Maluku. tahapan pertama *Peacekeeping*, merupakan tahapan resolusi konflik dimana proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan sementara dengan menggunakan keberadaan pihak ketiga untuk memisahkan pihak-pihak yang bertikai dan memastikan de-eskalasi konflik (*Absence of Direct Violence*) terjadi. Dalam tahapan ini, *Papalele* menggunakan instrument non-kekerasan seperti negosiasi dan komunikasi dalam aktifitasnya. *Papalele* juga dapat dikatakan sebagai pihak ketiga dan dapat dimasukkan dalam kategori mediator karena ketidak berpihakan mereka pada pihak tertentu yang bertikai. Meskipun masing-masing *Papalele* terafiliasi dalam komunitas agama tertentu namun mereka tidak ikut terlibat dalam peperangan, aksi kekerasan, dan apolitis. Satu-satunya keberpihakan *Papalele* pada perdamaian dengan anggapan konflik berdampak buruk dalam pemasukan rumah tangganya.

Kepentingan *Papalele* untuk menyambung hidup menjadikan mereka pada posisi netral dalam konflik. *Papalele* menentang kekerasan yang terjadi dan mengesampingkan segala sentimen agama dan menempuh berbagai resiko agar tetap bepergian ke pasar untuk membeli atau menjual hasil kebun dan laut. Sebagai contoh *Papalele* dari desa Tulehu yang sebelumnya menggunakan transportasi darat seperti angkutan umum menuju pasar Mardika (pusat perdagangan di kota Ambon) pada saat kerusuhan terpaksa harus menggunakan kapal cepat. Perjalanan yang ditempuh dengan menggunakan kapal cepat dimaksudkan agar menghindari daerah dominasi Kristen (Desa Suli dan Passo). Transportasi kapal cepat ini terlalu mahal bagi *Papalele* yang hendak berjualan di Kota, dengan tidak memiliki pilihan lain, *Papalele* dari desa Tulehu menghubungi teman *Papalele* Kristennya di desa Suli dan merundingkan jalan lintasan yang aman.

Kehadiran *Papalele* yang dianggap bukan sebagai ancaman oleh pihak lawan membuat hal ini menjadi lebih mudah bagi mereka untuk memasuki dan bepergian melewati daerah-daerah yang didominasi oleh agama lain. Upaya-upaya ini mungkin didorong oleh kebutuhan untuk bertahan hidup daripada upaya menyelesaikan konflik, namun *Papalele* dianggap telah meletakkan dasar bagi persepsi keamanan dua komunitas yang bertikai dan membuka jalan bagi resolusi konflik.

Secara psikologis keberadaan dan aktifitas perdagangan di Mardika membentuk persepsi aman pada masyarakat kota Ambon, yang

melihat *Papalele* Muslim dan Kristen berbaur di pasar dan tidak terluka. Semula transaksi perdagangan yang terjadi di Mardika hanya dilakukan oleh para *Papalele* dalam kurun waktu yang singkat, lama kelamaan menarik konsumen dari dua komunitas untuk ikut berbelanja di tempat tersebut. Selain karena wilayah Mardika yang dijaga aparat keamanan, pertimbangan para konsumen dari dua komunitas untuk ikut berbelanja langsung ke tempat ini karena harga komoditas yang dijual di Mardika relatif lebih murah, kebutuhan masyarakat misalnya ikan dan sayur masih dalam keadaan segar, serta lebih banyak pilihan dibandingkan menunggu *Papalele* komunitasnya untuk menjaja di wilayah masing-masing.

tahapan *Peacemaking* terlihat dari aktifitas *Papalele* dengan berjualan di pasar mempengaruhi rekonsiliasi kedua komunitas yang bertikai. Salah satu aktifitas *Papalele* yang berpengaruh dan membantu rekonsiliasi sosial komunitas Muslim dan Kristen terlihat dari keberadaannya di pasar *Baku-Bae* yang terdapat di wilayah Mardika. Bermula dari aktifitas *Papalele* yang jumlahnya tidak terlalu banyak, terbentuk persepsi aman, kemudian menarik masyarakat untuk ikut bertransaksi, pada akhirnya menjadikan pasar sebagai tempat berbaur masyarakat tanpa memandang afiliasi agama manapun. Dari komunikasi yang terbangun lewat proses tawar-menawar, berbaurnya masyarakat ambon lewat aktifitas perdagangan inilah istilah pasar *Baku-Bae* atau pasar perdamaian muncul sebagai bentuk rekonsiliasi masyarakat Ambon di tingkat akar rumput.

Meskipun belum ideal, namun bisa dikatakan kondisi Ambon jauh lebih kondusif dari waktu ke waktu. Resolusi konflik Maluku sampai saat ini masih berada dalam proses *Peacebuilding* namun rekonstusturksi sosial, ekonomi yang disyaratkan oleh Galtung [13] dalam *Peacebuilding* terlihat telah dilakukan oleh berbagai aktor termasuk *Papalele*. Rekonstruksi ekonomi dan sosial terlihat dari aktifitas pasar yang tetap berlangsung sejak konflik hingga saat ini. Aktifitas *Papalele* yang mampu menjamin tidak hanya aktifitas pasar tetap berjalan, namun roda ekonomi kota Ambon tetap berputar. Dari *Papalele* lah rekonstruksi ekonomi dan sosial mampu dilaksanakan untuk membangun kota Ambon Pasca Konflik.

***Papalele*: Bentuk Diplomasi Hibrida**

Aktifitas *Papalele* ini anomali dan tidak cukup bila hanya dijelaskan dalam track-3 atau jalur perdamaian lewat perdagangan, karena tidak seperti aktifitas seperti upaya resolusi konflik yang digagas oleh kelompok pedagang dengan membentuk pertemuan asosiasi pedagang (*Business Asociations*), *Papalele* di kota Ambon tidak memiliki paguyuban. Papelele berebeda dengan pedagang kaki lima yang memiliki komunitas. *Papalele* berjalan sendiri-sendiri namun mampu membangun relasi dan jaringan yang sifatnya informal baik antar sesama *Papalele* maupun dengan konsumen, aktifitas *Papalele* tidak seperti yang disyaratkan oleh Diamond dan Mc.Donald [1] dimana aktifitasnya aktor track-3 tidak sekedar mencari keuntungan namun dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi bangsa dan negara. Aktifitas *Papalele* semata-mata mencari keuntungan namun tidak dalam jumlah yang besar, hanya untuk memastikan kebutuhan rumah tangganya terpenuhi, dan tidak sampai dimaksudkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan bangsa.

Aktifitas *Papalele* yang berjalan tidak secara berkelompok pun anomaly bila dimasukkan hanya pada Track-4, Individu atau *private citizen* (*Peacemaking trough Personal Involvement*). Diamond dan McDonald [1] menjelaskan Track-4 sebagai aktifitas perdamaian yang dilakukan oleh individu lewat *private voluntary organization*, *exchange programs*, *special interest group, professional interest groups*, *democracy building institution* (Diamond McDonald, 1996: 60). Aktifitas track-4 yang yang dicontohkan oleh tidak dapat menjelaskan aktifitas *Papalele* secara individual dalam resolusi konflik Maluku, namun bukan berarti bahwa apa yang mereka lakukan tidak merubah persepsi kedua komunitas yang bertikai terhadap satu sama lain dan membuka jalan bagi proses perdamaian. Aktifitas dan aktor yang berada di persimpangan Track-3 dan Track-4 dalam Diplomasi Multi-Jalur ini membuat *Papalele* sebagai bentuk Diplomasi Hibrida jalur tiga setengah (Track-3.5) yang berpengaruh dalam resolusi konflik Maluku.

K**ESIMPULAN**

Konflik Maluku merupakan salah satu konflik sosial yang berkepanjangan (protracted social coflict) yang terlihat dari prakondisi konflik yakni *comunal contempt, human needs, government and states role*, dan *international linkage*. Konflik Maluku merupakan hasil dari akumulasi

E-ISSN : 2338-1779
http://ijws.ub.ac.id

persoalan-persoalan komunal yang menumpuk dan berakar, didasarkan pada pengalaman sejarah mulai masa kolonialisasi hingga tatanan sosial bentukan orde baru yang menciptakan *communal contempt* atau kondisi yang tidak harmonis antar kelompok masyarakat. Sebab-sebab utama maupun sebab-sebab pemicu kerusuhan Ambon yang pecah pada 1999, dan meluas ke wilayah Maluku lainnya hingga tahun 2002 tak terlepas dari persoalan *human needs* dimana deprivasi komunal yang dialami kedua komunitas di Ambon. Deprivasi terlihat pada kondisi surplus ekonomi oleh salah satu kelompok sementara kelompok lainnya tidak menikmati bahkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Ketidak mampuan suatu kelompok untuk mencukupi kebutuhannya (needs) akibat kebijakan otoritas diskriminatif yang berkuasa terhadap masyarakat Ambon hal ini berkaitan dengan *governace and state role* yang tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak hanya berimbas secara ekonomi, namun juga mempengaruhi aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat yakni keamanan. persoalan keamanan berkaitan dengan ketidak-mampuan negara dalam menangani konflik maluku sejak masa kemunculan (*emergence*), pecah (*outbreak*), dan eskalasi hingga masa deeskalasi kekerasan dalam konflik. keberadaan pihak eksternal seperti Laskar Jihad memiliki beterkaitan dengan *International Linkage* yang turut memberi warna dalam dinamika konflik Maluku.

Peran perempuan sebagai agen dalam rekonsiliasi konflik Maluku terlihat dua bentuk aktifitas, yang disengajakan (*intended*) dan tidak disengaja (*unintended*) dalam resolusi konflik Maluku. peran perempuan yang disengajakan untuk merekonsilisasi kedua komunitas terlihat dari eksistensi Gerakan Perempuan Peduli yang muncul di tingkat akar rumput. GPP terbentuk dari inisitif perempuan-perempuan dari komunitas agama yang bertikai di Maluku yang memiliki persamaan persepsi tentang perdamaian sebagai bentuk kebutuhan bersama (*Mutual Needs*). Proses rekonsiliasi yang tidak disengajakan (*unintended*) dilakukan oleh *Papalele* atau ibu-ibu pedagang ikan dan sayuran yang melihat bagaimana konflik berdampak buruk dalam pemasukan rumah tangganya. Proses interaksi terjadi di tingkat akar rumput antara dua komunitas agama yang berbeda, dimulai dari aktivitas ekonomi domestik yang dilakukan dengan transaksi perdagangan di pasar terjalin komunikasi antara dua komunitas agama dan perlahan-lahan mempengaruhi rekonsiliasi masyarakat Ambon. *Papalele* memainkan peranannya dalam resolusi konflik terlihat dari aktifitasnya dalam tahapan *Peacekeeping, Peacemaking* dan *Peace Building* di kota Ambon namun tidak mereka sengajakan (*unintended*) untuk penyelesaian konflik.

Keberadaan dan aktifitas perempuan pedagang (*Papalele*) ditingkat akar rumput sebagai aktifitas Diplomasi Hibrida terlihat dari anomali pelaku dan aktifitas *Papalele* yang tidak terkerangkai dalam pakem diplomasi Multi-Jalur. *Papalele* dan aktivitasnya berada pada persimpangan atau jalur tengah dari track-3 (*Peacemaking trough Commerce*) dan track-4 (*Peacemaking trough Personal Involvement*). Aktifitas perdagangan *Papalele* ini dilakukan secara individual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga namun dari transaksi perdagangan di pasar yang dilakukan *Papalele* dapat mempengaruhi persepsi kedua komunitas agama yang berkonflik untuk membangun kepercayaan satu-sama lain. Hai ini yang menjadi dasar bagi pembangunan perdamaian di Maluku..

UCAPAN TERIMA KASIH

ucapan terima kasih ditujukan pada Suster Brigita Renyaan, Jamal Riry, Hilda Bessy, yayasan Tifa damai Maluku, kesbangpol provinsi Maluku, dan pihak-pihak yang telah membantu secara substansi dalam penelitian ini. Terkhusus bagi *Papalele* di kota Ambon yang mewujudkan perdamaian Maluku tanpa mereka sadari.

DAFTAR PUSTAKA

[1]. Diamond, L., Mc.Donald, J. 1996, *Multi-Track Diplomacy, A systems Approach to Peace*, 3rd editions, Connecticut, Kumarian Press

[2]. Azar, Edward. 1990, *the Management of Protracted Social Conflict, Theory and Cases*, Aldershot, Dartmouth,

[3]. Van Klinken, Gerry. 1999, *What caused the Ambon violence*?, Inside Indonesia, No.60

[4]. Ryan, Stephen. 2006, *the Transformation of Violent Intercommunal Conflict*, Aldershot, Ashgate

[5]. Hermawan, Yulius P. (ed), 2007, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodolog*i, FISIP UNPAR

[6]. Brown, Michael E. (ed.), 1993, *Ethnic Conflict and International Security*, Princeton University Press

[7]. Brauchler, B, 2004, *Islamic Radicalism Online: the Mollucan Mission of the lascar jihad in Cyberspace*, Australian Journal of Anthropology, 15 (3),

[8]. Crocker, Chester A, Fen olser, Hampson, dan Pamela Aall (ed.), 2001, *Turbulent Peace: the Challenge of Managing International Conflict*,

Washington D.C, United States Institute of Peace Press

[9]. Smith, Anthony D 1997, *the Ethnic Source Of Nationalism* dalam Michael E Brown (ed.), *Ethnic Conflict And International Security,* Princeton University Press

[10]. Ismayilov, Gursel., 1999, *Ethnic Conflict and their Causes,*

[11]. Reimann. Cordula. 2002, *Why are Violent, Conflict Social Protracted?, Looking at Azar's Model of Protracted Social Conflict from Gender Sensitive Perspective,*

[12]. Galtung, Johan. 1976, three *Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding,* dalam Galtung, *Peace, War, and Defence: Essay in Peace Research II*, Copenhagen, Christian Ejlers

[13]. Montville, Joseph V. 1987, *the Arrow and the Olive Branch: the Case of Track Two Diplomacy,* Washington DC, Foreign Service Institute, Department of State

[14]. Berman M.R, Johnson, J.E (Eds.) 1977, *Unofficial Diplomacy*, New York, Columbia University Press,

[15]. Nan, Susan A.,1999, *Complementary and Coordination of Conflict Resolution Efforts in the Conflict over Abkhazia, South Ossetia, and Transdniestria,* Fairfax, Virginia, George Mason University

[16]. Mapendere, Jeffrey. 2000, *Track One and the Complementary of Tracks*, Culture of Peace Online Journal Vol. 2, September 2000

[17]. Effendi, Ziwar 1987, *Hukum Adat Ambon Lease*, Jakarta, Pradnya Paramita,

[18]. Sri Yanuarti (ed), 2003, *Konflik Maluku Tengah: Penyebab, Karakteristik dan Penyelesaian Jangka Panjang*, Jakarta, LIPI,

[19]. Bartels, Dieter. 1990, *From Black Dutchmen to White Moluccans: ethnic metamorphosis of an East-Indonesian Minority in Netherland,* Paper dipresentasikan dalam First conference on Maluku Research, University of Hawaii, Center for South East Asian Studies, Honolulu, 16-18 maret 1990

[20]. Bartels, Dieter. 2003, *the Evolution of God in the Spice Island: the Converging and Diverging of Protestant Christianity and Islam in the Colonial and Postcolonial Period*, paper dipresentasikan dalam symposium "Christianity in Indonesia", John Wolfgang Goethe University, Frankfurt, 14 Desember 2003

[21]. Cooley, F.L *Altar and Throne in Central Moluccan Societies*, 1963, Disertasi, Yale University, Connecticut, hal. 2

[22]. Trijono, Lambang. 2001, *Keluar dari Kemelut Maluku*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,

[23]. Pariela, Tonny D 1998, *Damai di Tengah Konflik Maluku*, Disertasi Program Studi Pembangunan, Program Pascasarjana UKSW, Salatiga

[24]. Center of Humanitarian Dialogue, 2011, *Pengelolaan Konflik di Indonesia- Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua, dan Poso*, Juni 2011, LIPI, Current Asia, Dan Center Of Humanitarian Dialogue,

[25]. Posen, Barry. 1993, *the Security Dilemma And Ethnic Conflict*, Jurnal Survival, Vol. 3, No.1, Spring 1993, MIT